



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16869-16880

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia

Ayu Nadira Wulandari^{1✉}, Halimah Tusaddiah², Ajeng Priska Sari³, Yunita Pebrina⁴, Abdi Waruwu⁴

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan

Email: tusaddiahhalimah22@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kependudukan sama dengan kata penjajahan yang merupakan penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Kependudukan ini memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat suatu Negara dalam segala aspek kehidupan baik itu aspek politik, ekonomi, agama, social budaya sampai bidang militer. Bagi bangsa Indonesia kependudukan atau penjajahan merupakan pengalaman sejarah yang sangat pahit, oleh karena silih berganti dijajah oleh bangsa asing. Salah satu bangsa yang sempat menjajah Indonesia adalah Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun (1942-1945). Oleh karena itu tulisan ini bertujuan menggambarkan secara teoritis tentang Sistem kependudukan Jepang di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi Pustaka melalui beberapa sumber baik buku, artikel dan sumber lainnya yang terkiat dengan kependudukan Jepang di Indonesia.

Kata Kunci: *Awal kependudukan, akhir kependudukan, dampak kependudukan, Jepang, system penjajahan.*

Abstract

Population is the same as the word colonization, which is the control of a country over another country. This occupation has a negative impact on the lives of the people of a country in all aspects of life, be it political, economic, religious, social and cultural aspects to the military field. For the Indonesian people, occupation or colonization is a very bitter historical experience, because one after another they were colonized by foreign nations. One of the nations that had colonized Indonesia was Japan for approximately three and a half years (1942-1945). Therefore, this paper aims to theoretically describe the Japanese occupation system in Indonesia. The data collection technique used is a literature study through several sources including books, articles and other sources related to the Japanese population in Indonesia.

Keyword: *Beginning of population, colonization system, end of population, impact of population, Japan.*

PENDAHULUAN

Bagi Bangsa Indonesia, peralihan dari era kolonial Belanda ke era Jepang merupakan titik balik dalam sejarah mereka. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak pernah berhenti. Meskipun ada perbedaan dalam cara Jepang dan Belgia menjalankan bisnis, keduanya berdampak negatif terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jepang dapat dengan mudah menjauhkan Indonesia dari hegemoni Belanda. Salah satu lokasi strategis di Nusantara yang terbukti berhasil adalah pemisahan Jepang dari Belanda. Tarakan adalah nama wilayah Nusantara yang pertama kali diserbu Jepang pada 12 Januari 1942. Berakhirnya perang Belgia melawan Jepang ditandai dengan deklarasi perang bersama melawan Jepang dan Uni Soviet pada tanggal 9 Maret 1942, yang juga menandai dimulainya pendudukan Jepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia dan secara bertahap melakukan perubahan untuk mengembalikan kekuasaan Barat. Karakteristik fisik orang Jepang hampir sama dengan orang Indonesia, dan ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Jepang. Karena itu, Jepang dapat dengan mudah mengidentifikasi tiga A yang mereka miliki: (1) Asia Timur Jepang; (2) Asia Selatan Jepang; dan (3) Asia Timur Jepang. Semboyan ini telah berhasil mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Jepang dipandang oleh Rakyat Indonesia sebagai penolong mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Akhirnya, Jepang sendiri mengakui bahwa ada dampak negatif yang signifikan yang terutama menimpa rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui, bangsa barat telah lama menjajah

Indonesia. Pembuatan semacam ini dilakukan Jepang dengan cara yang metodis. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memberikan bantuan kepada tentara Belanda untuk melatih warga negara Indonesia yang pada akhirnya dapat menangani tugas-tugas pemerintahan yang selama ini mereka kerjakan. Orang-orang di Jepang sendiri memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja sama dengan orang-orang di Indonesia sebagai sarana untuk mewujudkan kutipan-kutipan "Asia untuk Asia" seperti yang selama ini diutarakan.

Setelah Jepang berhasil menaklukkan Indonesia, pemerintah melakukan beberapa kali konsultasi untuk menjalankan langkah pemerintah selanjutnya di bawah pengawasan militer Jepang. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjalankan administrasi pemerintahan, pemerintah Jepang segera memisahkan aktor-aktor bermasalah di dalam sistem pemerintahannya. Bagaimanapun, Jepang mendorong mata-matanya untuk membantu melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan di atas. Namun, jumlah mereka tidak sebanyak yang diharapkan, sehingga pemerintah Jepang menghubungi warga negara yang sudah berada dalam posisi lemah untuk membantu mereka memahami sifat dari pertempuran yang telah hilang dari Belgia.

Periode pemerintahan Jepang selama tiga dari lima tahun terakhir adalah periode yang sangat singkat dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya (Belanda). Karena rakyat Indonesia telah lama menginginkan perdamaian, mereka memiliki rasa solidaritas yang kuat terhadap Jepang dan bersedia menanggung segala konsekuensi dari tindakan mereka. Akibatnya, rakyat Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk melihat Jepang diperlakukan secara adil. Masuknya Jepang ke Indonesia disambut dengan tangan terbuka oleh rakyat Indonesia. Pada saat itu, Sambutan dengan cepat berubah menjadi kebencian ketika terlihat bahwa tujuan Jepang datang ke Indonesia tidak sebaik Belgia. Perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia yang kejam, bengis, dan tidak konsisten, pada akhirnya membuat rakyat Indonesia membangkang dan melawan. Dikatakan oleh penulis bahwa Jepang selalu bersikap dingin terhadap rakyat Indonesia, mencari titik temu untuk mengejar tujuannya mencerdaskan Indonesia. Dengan begitu, Jepang menjalankan misinya menggunakan sistem pemerintahan militer dan kebijakan kebijakannya, serta berbagai cara untuk mendapatkan simpati kepada bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, tujuan dalam kajian ini membahas sistem pemerintahan atau ketatanegaraan masa pendudukan Jepang di Indonesia, mulai dari awal menguasainya sampai kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Artikel ini menurut peneliti menarik dengan alasan bahwa pada masa Jepang Indonesia terlihat begitu simpati, sebab Jepang mampu mengusir kolonial Belanda.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi ini identik dengan kegiatan menganalisis teks atau wacana (Hamzah, 2019). Disebut penelitian kepustakaan karena hampir keseluruhan bahan atau data yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014). Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menjadi basis teori dan data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dapat menjadi sumber referensi untuk pengembangan teori dan pemikiran dalam bidang penelitian yang terkait. Studi kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Awal Kependudukan Jepang Di Indonesia

Dalam sejarah Indonesia, Jepang kadang-kadang disebut sebagai Hindia-Belanda (nama Indonesia pada masa kolonial). Kemudian, dengan runtuhnya ladang emas Belanda di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Jepang dapat dengan mudah mengumpulkan ladang emas Belanda yang terletak di Batavia (Jakarta). Kemudian ada Divisi ke-2 di pihak Jepang, yang diperuntukkan bagi kelas satu di Jawa Barat, dan Divisi ke-48 di Jawa Tengah. Jepang ini dipimpin oleh jenderal Jepang Hitoshi Imamura, yang akan segera memimpin ekspedisi militer untuk menaklukkan Jepang. Pada akhirnya, kekuatan Jepang ditandingi oleh Divisi ke-38 di bawah pimpinan Kolonel Shoji. Ekspor baru Jepang ke bagian timur Indonesia juga akan terpengaruh. Kemampuan pertahanan Jepang sangat kuat, tetapi kemampuan pertahanan Belgia telah melemah selama pangkalan sebelumnya. Sebagai negara militeristik di Asia, Jepang sangat berharga. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sebagian besar pergerakan nasional di beberapa negara Asia, khususnya Indonesia. Dengan kekalahan Perang Dunia II, Jepang memasuki era peperangan baru. Sebagai contoh, ada beberapa pernyataan dari pejabat pemerintah Indonesia yang mengindikasikan bahwa akan ada bencana di Lautan Teduh di masa depan. Hal ini didasarkan pada analisis politik, dimana evolusi politik Indonesia ditandai dengan sikap tegas yang menyangkal adanya fasisme eksternal. Pernyataan ini disampaikan dengan jelas oleh Gabungan Angkatan Kepolisian Indonesia (GAPI).

Sebaliknya, ada ramalan Joyoboyo di Pulau Jawa yang menyatakan bahwa pada suatu saat nanti, pulau ini akan diserang oleh bangsa kulit kuning, tetapi tingkat serangannya hanya sedikit, dan setelah selesai, Indonesia akan merdeka. Ramadan yang telah diterima oleh

masyarakat tidak dipaksakan atau dieksploitasi oleh Jepang, oleh karena itu masuknya Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sebuah keanehan. Imigrasi Jepang yang tersebar di seluruh Jawa terkadang menghasilkan populasi yang lebih besar daripada Sekutu. bentuk kekalahan dari pemerintah Belgia. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang angkatan ke-16 berhasil bertempur di tiga lokasi terpisah: Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah). Setelah penemuan ini, kota Batavia (Jakarta) diakui oleh Jepang sebagai "kota terbuka" pada tanggal 5 Maret 1942, dan tidak lagi menjadi bagian dari pendudukan Jerman. Setelah itu, Jepang secara diam-diam membagi wilayah di dekatnya, yaitu Bogor. Setelah peringatan keras dari pemerintah Belgia kepada pemerintah Jepang, Jepang akhirnya berhasil menaklukkan dan mengganti nama kota Bandung pada tanggal 1 Maret 1898. Kolonel Toshinori Shoji memimpin ekspedisi tersebut, yang melibatkan 5.000 orang yang telah tiba di Eretan, dekat Cirebon. Hari itu juga terbukti berhasil menstabilkan wilayah Subang. Ketika mereka mendekati Kota Bandung, Jepang meninggalkan Lembang dan Sumedang dan berjalan dengan kepala tegak. Sepanjang jalan, masyarakat pedesaan Bandung menyambut Jepang dengan banzai.

Masyarakat Bandung telah berpaling dari Jepang karena keyakinan bahwa Jepang adalah bangsa yang baik hati dan akan melindungi kepentingan Indonesia dari kepentingan Amerika Serikat (Sofianto, 2014: 53). Momentum seperti ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melanjutkan usahanya untuk membawa Belanda dan kawan-kawannya lebih dekat ke perbatasan Kalijati yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Bandung. Mundurnya Jerman dari wilayah tersebut berlanjut hingga 4 April 1942, di mana Jepang berhasil merebut kembali wilayah tersebut.

Pada tanggal 7 Maret 1942, seorang tentara Belgia di sekitar Bandung meminta bantuan penduduk setempat. Kolonil Shoji mengirimkan pesan ini kepada Jendral Imamura; meskipun demikian, upaya penduduk setempat harus didukung oleh seluruh Pasukan Serikat Jawa. Jika pemerintah Belgia tidak mematuhi ultimatum Jepang, maka Bandung akan dihancurkan oleh serangan udara. Jenderal Imamura juga melakukan persiapan lain agar Gubernur Jenderal Belanda dapat ikut serta dalam gempa bumi di Kalijati. Jika tren ini terus berlanjut, maka serangan ke Bandung akan segera dimulai. Namun, di kemudian hari, pemerintah Belgia menekan Jepang. Menteri Utama Tjarda van Starckenborgh Stachouwer, yang juga dikenal sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda, bersama dengan beberapa anggota pejabat yang buta huruf dan satu orang yang melakukan perjalanan ke Kalijati untuk bekerja. Pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintahan Jepang atas wilayah Indonesia secara resmi dipegang oleh pemerintahan militer Menurut UUD No.1 (Osamu Seroi) yaitu Undang- undang yang dikeluarkan oleh panglima tentara keenambelas tanggal 7 Maret 1942, menyatakan bahwa

Copyright @ Ayu Nadira Wulandari, Halimah Tusaddiah, Ajeng Priska Sari., Yunita Pebrina,

pembesar balatentara Jepang Nipon memegang kekuasaan militer dan segala kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal.

Praktek pelaksanaan sistem pemerintahan ini dipegang oleh dua angkatan perang yaitu Angkatan Darat (Rikugun) dan Angkatan Laut (Kaigun), yang masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan, yaitu ;

1. Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia di bawah kekuasaan Rikugun (Angkatan Darat Jepang). Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura
2. Di bawah kekuasaan Rikugun (Angkatan Darat Jepang) Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian di bawah kekuasaan Kaigun (Angkatan Laut Jepang)
3. Rikugun maupun Kaigun selalu bersaing dalam mengambil hati rakyat jajahan, sampai detik-detik perang usai, semua bagian wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar, untuk Asia Tenggara berkedudukan di Saigon, kemudian baru berhubungan dengan Tokyo.

Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia

Mengenai hukum pidana Indonesia, disebutkan bahwa Jepang bukanlah negara pertama yang menghukum warga negara Indonesia. Sebelum bangsa Jepang masuk ke Indonesia, bangsa ini sebelumnya dipenjara oleh bangsa Spanyol dan bangsa Portugis sekitar satu abad lamanya. Kemudian, bangsa Belanda memenjarakan mereka selama tiga periode waktu yang berbeda, masing-masing sesuai dengan kondisi nasional dan situasi politik internasional saat itu.

Jepang secara resmi mengakui Indonesia sebagai negaranya, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya. Hal ini terjadi pada tanggal 9 Maret 1942, saat pendudukan Jepang atas beberapa bagian dari Kongo Belgia di sekitar wilayah Kalijati. Laporan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belgia atas Indonesia. Indonesia juga memperkenalkan makanan panggang pertama dalam sejarah benua Asia, yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Eropa dengan mengorbankan bangsa Asia, khususnya Jepang. Ada satu hal yang sangat menarik dari proses penandatanganan ini, yaitu panglima perang Hindia Belanda, atau Jenderal Teer Porter, yang mewakili pemerintah Belanda, bukan Gubernur Jenderal Tjarda Van Starckenborgh. Belanda menyadari bahwa Jepang tidak akan lama menjajah Indonesia, karena Amerika Serikat yang dikalahkan Jepang pada perang 1941 telah bangkit dan berhasil merebut beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Dan dengan itu, dalam waktu yang sangat singkat, Indonesia akan sekali lagi terpisah dari Jepang oleh Laut dan akhirnya bergabung dengan Belgia sebagai tetangga terdekatnya.

Kebijakan lain yang dilakukan Jepang adalah memanfaatkan tenaga rakyat jelata yang dikenal dengan istilah Romusha, yang terdiri dari organisasi-organisasi semi militer dan

militer yang berasosiasi dengan para petani Indonesia, seperti Heiho, Keibodan, dan Seinendan. Mereka dilatih dalam kemampuan berperang, penggunaan peralatan militer serta strategi dalam berperang.

Akhir Pendudukan Jepang di Indonesia

Sekutu tiba di Irian Barat pada April 1944. Keadaan Jepang juga semakin sulit. Ketika Pulau Saipan, yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Mariana, jatuh ke tangan Sekutu pada bulan Juli 1944, situasi menjadi semakin mendesak. Pulau tersebut sangat penting bagi Sekutu karena pesawat pengebom B 29 Amerika Serikat dapat mencapai Saipan dari Tokyo dalam waktu singkat. Hal ini menimbulkan kekacauan di masyarakat Jepang. Situasi Jepang juga memburuk. Dengan demikian, pada tanggal 17 Juli 1944, Kabinet Tojo runtuh dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.

Perdana Menteri Koiso mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1944, agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Deklarasi ini disebut sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (juga dikenal sebagai BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai dalam bahasa Jepang) untuk memenuhi janji Koiso untuk kemerdekaan.

Salah satu tujuan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki berbagai aspek yang berkontribusi pada pembentukan negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI memiliki 67 anggota, terdiri dari orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat adalah ketua BPUPKI, dan dibantu oleh dua ketua muda dari Jepang, RP Suroso dan Ichibangse. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Cuo Sangiin, Jalan Pejambon, Jakarta (sekarang Departemen Luar Negeri). BPUPKI mengadakan sidang dua kali selama masa jabatannya. Sidang pertama membahas rumusan dasar negara dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang kedua membahas batang tubuh UUD negara Indonesia merdeka dari 10 hingga 16 Juli 1945.

BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, juga dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai). Ir. Soekarno adalah ketua PPKI. Sementara itu, serangan nuklir Sekutu terhadap dua kota di Jepang membuat situasi di Jepang semakin sulit. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Little Boy, sebuah bom atom, dijatuhkan di kota Hiroshima, menewaskan 129.558 orang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu membom Nagasaki dengan bom atom. Akibat bom kedua kota tersebut, Jepang menjadi tidak berdaya dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945.

Di pagi hari tanggal 15 Agustus 1945, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang telah menyatakan penyerahan tanpa syarat, yang menandakan bahwa perang telah berakhir. Berita bahwa Jepang telah dikalahkan menjadi kenyataan. Para pemuda, termasuk Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, dan Wikana, antara lain, menerima berita tersebut melalui siaran radio di Jakarta. Karena Jepang sudah melemah, Indonesia memanfaatkan peluang kekalahan Jepang untuk lepas dari penjajahannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka mengumumkan kemerdekaannya, yang menandakan bahwa kekuasaan Jepang di Indonesia telah berakhir.

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

1. Aspek Kehidupan Politik

Dalam bidang politik, tindakan pertama kali yang dilakukan oleh pihak Jepang adalah membekukan segala kegiatan politik. Semua pergerakan rakyat yang berbau politik dilarang. Seolah-olah pemerintah militer Jepang menerapkan sistem fasis dan menetapkan garis politik pemerintah sebagai satu-satunya aliran yang harus ditaati. Rakyat tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Kemenangan gemilang yang diperoleh tentara Jepang dalam waktu yang sangat singkat, memang menakutkan, menimbulkan kepercayaan orang terhadap keunggulan dan kemampuan tentara Jepang dan meningkatkan martabat Jepang pada taraf yang sangat tinggi. Keunggulannya merupakan faktor yang menentukan kepemimpinan Jepang di antara bangsa Asia.

Sebenarnya pemerintahan militer Jepang merupakan pemerintahan yang diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintah dibagi menjadi beberapa bagian Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Jakarta (dulu Batavia). Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukittinggi (Sumbar). Sedangkan Indonesia bagian Timur diperintah oleh tentara ke-2 (angkatan laut) dengan pusatnya di Makasar (Sulsel). Pemerintah angkatan darat disebut Gunseibu, dan pemerintah angkatan laut disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi tiga Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapus. Akhirnya Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (Syu) dan diperintah oleh seorang Residen (Syucokan). Karesidenan terdiri dari Kotapraja (Syi), Kabupaten (Ken), Kawedanan atau distrik (Gun), Kecamatan (Son), dan Desa (Ku) (Muttaqin, dkk, 2011: 83). Kebijakan dibidang politik yang dapat diketahui diantaranya:

- Pelarangan menggunakan bahasa Belanda dan Inggris, tetapi memakai bahasa Jepang
- Membentuk gerakan tiga A
- Membagi tiga bagian kekuatan militer Jepang di Indonesia

- Mengubah sistem struktur birokrasi pemerintahan menjadi pemerintahan militer dan pemerintahan sipil
- Merangkul umat Islam Indonesia
- Membentuk organisasi-organisasi politik buatan Jepang dan melakukan kerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis

2. Aspek Khidupan Ekonomi dan Sosial

Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara imperialis tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencar daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan mencan tempat pemasaran terhadap hasil-hasil industrinya Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada jaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Kebijakan pemerintahan Jepang dalam melakukan sistem pengaturan di bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan pengumpulan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Sello Kaisya. Dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-kebijakan di antaranya sebagai berikut ;

1. Sistem autarki (rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang)
2. Sistem tonarigumi (organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang)
3. Memonopoli hasil perkebunan oleh Jepang berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan
4. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.

Dalam bidang sosial diberlakukannya Romusha, karena melihat dari praktek praktek eksploitasi ekonomi masa pendudukan Jepang, yang telah banyak menghancurkan sumber daya alam, sehingga menimbulkannya krisis ekonomi. Pergerakan sosial yang dilakukan pemerintah Jepang dalam bentuk Kinrohosi atau kerja bakti yang lebih mengarah pada kerja paksa hanya untuk kepentingan perang. Kemudian semakin luasnya daerah pendudukan Jepang, memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk membangun sarana pertahanan berupa kubu-kubu, lapangan udara, jalan raya dan gudang bawah tanah. Tenaga yang mengerjakan itu semua diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya, sehingga

kegiatan ini menggunakan sistem kerja paksa istilah terkenalnya Romusha. Pada awalnya mereka melakukan dengan sukarela, lambat laun terdesak oleh perang pasifik sehingga pengerahan tenaga diserahkan kepada Romukyokai yang ada di setiap desa. Banyak tenaga Romusha yang tidak kembali dalam tugas sebab meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi serta kesehatan yang mencukupi.

3. Aspek Kehidupan Pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan masa pendudukan Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Di samping itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan nama-nama dibahasaindonesiakan. Namun tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapat bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan lawarunya dalam perang Pasifik.

Selanjutnya, hal yang menarik adalah sebuah pemaksaan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada Dewa Matahari (Seikerei). Penghormatan ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimigoyo). Jadi, tidak semua rakyat Indonesia menerima kebiasaan akan hal ini terutama dari kalangan umat Islam. Sehingga penerapan Seikerei ini ditentang oleh kalangan umat Islam, salah satunya perlawanan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Zainal Mustafa pengasuh Pesantren Sukamanah, Jawa Barat.

Pada intinya, Jepang mengambil alih pendidikan di Indonesia dan mengubah sistem pendidikan di Indonesia secara signifikan. Kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia melarang semua sekolah bekas Belanda dan hanya memperbolehkan beroperasi sekolah-sekolah pribumi. Jepang memanfaatkan pendidikan untuk membantu kepentingan perang. Para peserta didik dilatih agar memiliki jiwa kemiliteran. Pendidikan moral Jepang ditanamkan pada peserta didik. Selain itu para guru juga dilatih agar bisa mengajar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jepang.

4. Aspek Kehidupan Kebudayaan

Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk dapat menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormati ke arah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormati seperti itu merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.

5. Militer Dalam bidang militer

Jepang telah mendirikan organisasi pergerakan berbasis militer semata-mata untuk

kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Pada tahun 1943 Jepang semakin intensif dalam mendidik dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer. Karena situasi di medan perang Asia-Pasifik semakin menyulitkan Jepang. Dari situasi tersebut, maka Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang bisa diikutsertakan dalam pertempuran dalam menghadapi Sekutu.

Berdasarkan hal tersebut, Jepang mempersiapkan barisan militer dengan mendirikan gerakan-gerakan berbasis militer, sebagai berikut: 1) Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun; 2) Losyi Seinendan, yaitu barisan cadangan tau seinendan putri; 3) Bakutai, yaitu pasukan berani mati; 4) Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23-35 tahun. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan; 5) Hizbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam; 6) Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18 – 25 tahun; 7) Jawa Sentotai/Hokokai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa; 8) Suisyintai, yaitu barisan pelopor; 9) Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943; 10) Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944; 11) Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943.

SIMPULAN

Setelah jatuhnya daerah kekuasaan Hindia Belanda di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, memudahkan Jepang untuk menaklukan pusat kekuasaan Hindia Belanda yang berada di Batavia (Jakarta). Tentara Jepang itu dipimpin oleh letnan jenderal Hitoshi Imamura yang nantinya akan bertugas melawan sekutu dalam memperebutkan Jawa. Jepang secara resmi menguasai yakni tepat tanggal 9 Maret 1942 saat penandatanganan piagam penyerahan dari Belanda ke Jepang di sekitar daerah Kalijati. Jepang dapat dengan mudah menyebarkan semboyan tiga A mereka, yaitu (1) Jepang Cahaya Asia; (2) Jepang Pemimpin Asia; dan (3) Jepang Pelindung Asia. Dari semboyan ini berhasil mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Jepang hanya menjajah Indonesia selama tiga setengah dan dikalahkan oleh Amerika Serikat dan menyetakan menyerah secara resmi tanggal 15 Agustus 1945. Namun, dibalik kependudukan Jepang di Indonesia, banyak sekali dampak yang terjadi di beberapa aspek diantaranya politik, ekonomi dan social, Pendidikan, kebudayaan, dan juga militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Badran, Wayan. 1997. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum. Jakarta : Erlangga.
- Fadli, R & Dyah Kumalasari. 2019. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13(2), 189-205.
- Hamzah, Amir (2019) Metode Penelitian Kualitatif : Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Peqnerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. Batu: Literasi Nusantara.
- Harahap, Nursapia (2014) "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*, vol. 08, no. 01, pp. 68-73.
- Ishak, M. 2012. Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal Inovasi* 9(1).
- Isnaeni, H & Apid. 2008. Romusa : Sejarah Yang Terlupakan (1942-1945). Yogyakarta : Ombak.
- Muslimin, Y & Hudaidah. 2021. Pendidikan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Journal Of Practice Learning and Educational Development* 1(3), 130-134.
- Muttaqin, dkk. 2011. Sejarah Pergerakan Nasional. Bandung : Humaniora.
- Nagazumi, dkk. 1998. Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang. Yayasan Obor Indonesia.
- Notosusanto, Nugoroho.. 1978. Tentara Peta. Jakarta: Gramedia.
- Ricklefs. 1981. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004. Jakarta : Serambil Ilmu Semesta.
- Sakto, Zein. 2022. Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia. Diakses Pada 10 Oktober 2023. Dari <https://www.awalilmu.com/2015/04/proses-berakhirnyakekuasaan-jepang-di-indonesia.html?m=1>
- Sofianto, K. 2014. Garut Pada Masa Pemerintahan Jepang. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 16, No. 1.
- Waworuntu, S dan Indah Tjahjawulan. 2020. Kulit Muka Majalah Djawa Baroe :Representasi Propaganda Pendudukan Jepang di Indonesia 8(2), 198-226
- Yasmis. 2007. Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar* 4(2), 24-32.
- Zed, Mestika (2014) Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.